

## **Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia**

*The Effect of Agricultural Credit on Farmers Welfare in Indonesia*

**Fatchur Rozci\* dan Dona Wahyuning Laily**

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
\*email korespondensi: [fatchur\\_rozci.agribis@upnjatim.ac.id](mailto:fatchur_rozci.agribis@upnjatim.ac.id)

### **Info Artikel**

Diajukan: 20 April 2023  
Diterima: 10 Mei 2023  
Diterbitkan: 20 Juli 2023

### **Abstract**

Agriculture is an important sector in a country's economy because it makes a major contribution to the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. According to data from the Central Statistics Agency (BPS) for 2021 the agricultural sector contributed 13.70% to GDP. Farmers in Indonesia are mostly located in rural areas and have less access, so the government must provide support such as providing capital by making agricultural credit policies to support the sustainability of agricultural businesses and improve the welfare of farmers. The agricultural credit policy is one of the government's efforts to facilitate farmers' access to capital to develop their agricultural businesses. This research 'The Influence of Agricultural Credit on the Welfare of Farmers in Indonesia' uses a literature review approach by collecting data or sources related to a particular topic from various sources, such as journals, books, the internet and other library sources. The results of this summary, analysis, and synthesis are then written descriptively in the form of scientific articles. The Influence of Agricultural Credit on Farmer Welfare in Indonesia aims to determine agricultural credit policies, farmer welfare, the application of agricultural credit and the influence of agricultural credit.

### **Keyword:**

Capital, Credit, Agricultural welfare

### **Abstrak**

Pertanian adalah sektor penting dalam perekonomian suatu negara karena memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 sektor pertanian menyumbang sebesar 13,70% terhadap PDB. Petani di Indonesia sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki akses yang kurang, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan seperti pemberian modal dengan membuat kebijakan kredit pertanian untuk mendukung keberlangsungan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan kredit pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi akses petani terhadap modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Penelitian 'Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia' ini menggunakan metode pendekatan tinjauan pustaka atau *Literature Review* dengan cara mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik tertentu dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, internet, dan sumber pustaka lainnya. Hasil dari ringkasan, analisis, dan sintesis ini kemudian ditulis secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah. Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kredit pertanian, kesejahteraan petani, penerapan kredit

pertanian dan pengaruh kredit pertanian.

**Kata Kunci:**

Modal, Kredit, Kesejahteraan pertanian

## PENDAHULUAN

Pertanian adalah sektor penting dalam perekonomian suatu negara karena memberikan kontribusi besar terhadap produksi pangan dan perekonomian nasional serta menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal pertama 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai sekitar 13,70%, Sektor pertanian juga merupakan sektor yang menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Sekitar 28,50% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian, menurut data BPS pada Februari 2021. Sektor pertanian juga dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Karena sebagian besar petani di Indonesia masih berada di daerah pedesaan dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dan infrastruktur, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada mereka melalui program-program yang terkait dengan sektor pertanian.

Dalam mengembangkan usaha pertanian, petani membutuhkan modal yang cukup besar. Sayangnya, tidak semua petani memiliki akses ke sumber pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha pertanian mereka, padahal akses ke sumber pembiayaan yang memadai dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian juga pendapatan petani yang akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan kredit pertanian untuk mendukung keberlangsungan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan kredit pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi akses petani terhadap modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kebijakan ini juga dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta mendukung diversifikasi usaha pertanian. Kebijakan kredit pertanian juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut (Ali *et al.*, 2019) dalam jurnalnya menunjukkan bahwa penjabatan kredit memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas pertanian dan keuntungan petani, terutama melalui investasi dalam input pertanian.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan kredit pertanian telah diterapkan sejak tahun 1960-an melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kebijakan ini dilakukan untuk memfasilitasi akses petani terhadap modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Beberapa tujuan dari kebijakan kredit pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong diversifikasi usaha pertanian, menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi petani. Konsep kebijakan kredit pertanian mencakup aspek ketersediaan kredit, bunga kredit yang terjangkau, fleksibilitas kredit, dukungan teknis, serta evaluasi dan monitoring kredit. Konsep ini harus diterapkan secara holistik untuk memberikan dukungan finansial yang efektif dan efisien bagi sektor pertanian dan petani.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan kredit pertanian harus dikelola dengan hati-hati dan terukur untuk memastikan bahwa kredit tersebut benar-benar membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta tidak menimbulkan beban

berlebih bagi petani dalam membayar kembali kredit yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan kredit pertanian. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan kredit pertanian, kesejahteraan petani, penerapan kredit pertanian dan pengaruh kredit pertanian di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Literature Review, yaitu cara untuk mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik tertentu dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, internet, dan sumber pustaka lainnya. Setelah melakukan tinjauan pustaka, peneliti akan membuat ringkasan, menganalisis, dan mensintesis secara kritis dan mendalam dari artikel-artikel yang ditinjau. Hasil dari ringkasan, analisis, dan sintesis ini kemudian ditulis secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian digunakan untuk memaparkan, mengeksplorasi, dan menjelaskan semua fenomena dan masalah yang diuji dengan interpretasi yang tepat. Fenomena yang diteliti dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, atau perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Kajian penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia. Untuk menguraikan pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia diperlukan studi *Literature View* yang difokuskan pada pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dampak yang ditimbulkan kredit pertanian untuk rakyat Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Kredit Pertanian Di Indonesia**

Dalam melakukan sebuah usaha tani petani memerlukan layanan keuangan yang dapat mendukung perkembangan pertanian. Selain itu akses dalam pelayanan keuangan dapat menolong rumah tangga untuk memperlancar konsumsi pada saat terjadi krisis atau permasalahan. Terlepas dari pentingnya akses ke layanan keuangan, akses kredit untuk petani di sebuah negara yang berpenghasilan rendah sangatlah di perlukan. Akses kredit dalam konteks ini diartikan sebagai persetujuan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan formal (bank/lembaga keuangan mikro (LKM) (Musshoff *et al.*, 2023).

Dalam berbagai situasi peranan kredit pertanian sangat berguna dalam pembangunan di sektor pertanian. Kredit adalah salah satu dari faktor pendukung yang utama dalam mengembangkan teknologi usaha tani. Kredit pertanian tidak hanya sekedar faktor mempercepat pembangunan pertanian akan tetapi berguna pula sebagai alternatif pembantu dalam memperlancar pembangunan pertanian seperti: menolong petani kecil dalam mengatasi masalah keterbatasan modal dengan bunga yang diberikan relatif rendah, mengurangi kecanduan petani akan pedagang perantara maupun pengepul sehingga dapat memperbaiki tatanan dan pola pemasaran dari hasil pertanian serta dorongan bagi petani guna memajukan produksi hasil pertaniannya. Di negara berkembang seperti indonesia, peran kredit pertanian erat kaitannya dengan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan petani yang tidak dapat diperoleh dari modal sendiri yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan kredit pertanian telah menjadi salah satu kegiatan pemerintah yang paling penting (Ololade & Olagunju, 2018).

Secara eksklusif, kredit bermula dari program pemerintah yang sudah lama dilakukan guna memenuhi ketimpangan dana yang ada di perdesaan demi pembangunan pertanian.

Pada dasarnya kredit program yang dilakukan pemerintah merupakan suatu paket kredit yang menjadi bagian dari salah satu program peningkatan pertanian. petani menggunakan kredit yang diberikan untuk membeli pupuk, pestisida, herbisida dan kebutuhan pertanian yang lainnya (Sossou *et al.*, 2014).

Dalam pelaksanaan kebijakan kredit program beberapa program yang pernah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya yaitu subsidi pada tingkat suku bunga, subsidi terhadap biaya risiko dalam kegagalan kredit, subsidi kepada biaya administrasi dalam penyaluran, pelayanan dan penarikan kredit. Disamping itu, jika ditelaah secara lebih dalam kredit yang umumnya diwujudkan dalam saprodi, maka subsidi pemerintah yang diberikan untuk impor pupuk, benih dan obat-obatan merupakan subsidi secara tidak langsung bagi kredit program. Dengan demikian, sesungguhnya korbanan yang harus dikeluarkan untuk mendukung kredit program cukup besar (Ashari, 2019).

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan perkreditan untuk sektor pertanian dengan mengarahkan pada keterlibatan perbankan formal sebagai eksekuting sudah merupakan langkah yang benar. Namun, kebijakan pemerintah tersebut perlu diimbangi dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam membantu petani untuk meningkatkan skala usaha, kemampuan manajerial maupun aksesibilitas petani terhadap perbankan formal. Bantuan dan fasilitasi pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk Bantuan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), pegadaian dan lain-lainnya (Abidin, 2021).

Kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian. Seiring dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan di lapang, program Bimas mengalami penyempurnaan menjadi Inmas, Inmum, Insus dan Supra Insus. Kredit Bimas selanjutnya berganti nama menjadi Kredit Usaha Tani (KUT). Setelah era KUT, secara silih berganti maupun dalam waktu bersamaan pemerintah meluncurkan berbagai jenis skim kredit/bantuan modal baik yang bersifat bantuan langsung/bergulir (misal: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), subsidi bunga (misal: Kredit Ketahanan Pangan (KKP)) atau yang telah mendekati komersial (misal: Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) (Safitri, 2020).

Memang diakui tidaklah mudah untuk menyusun skim kredit yang ideal. Namun setidaknya harus ada indikator-indikator yang jelas, agar pemberian kredit program tidak dilakukan secara asal-asalan karena hanya untuk mengejar target realisasi ataupun untuk membentuk citra sebagai kebijakan populis. Akibatnya seringkali pemberian kredit menjadi kurang tepat sasaran dan terkadang ada ketidaksinergian di antara pelaksanaan sebuah skim kredit program satu dengan yang lainnya. Pemberian kredit yang tidak tepat sasaran akan berdampak pada kredit macet atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban (Prayitno & Sapuguh, 2018). Perlu disadari bahwa dalam merealisasikan kredit program ini, sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi pada berbagai hal, diantaranya subsidi terhadap bunga kredit, bahkan dalam kasus grant pemerintah menanggung semua beban kredit, subsidi terhadap risiko kredit, yang dalam kredit non program (formal) dijamin oleh lembaga penjaminan kredit, dan subsidi untuk biaya administrasi, penyaluran serta penarikan kredit (Rasoki & Sudhiebo, 2019).

### **Kesejahteraan Petani di Indonesia**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak. Tingkat kesejahteraan dapat

dinilai berdasarkan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual.

Dalam menilai kesejahteraan petani, perlu mempertimbangkan aspek pendapatan, ketersediaan sumber daya, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan pangan. Pemerintah perlu mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, seperti program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan, yang dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani secara keseluruhan. Kesejahteraan petani dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Pendapatan yang stabil merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut (Lampah *et al.*, 2017) kesejahteraan merupakan jumlah kepuasan yang didapat oleh seseorang dari hasil konsumsi pendapatan yang diperoleh. Indikator kesejahteraan petani adalah perkembangan pendapatan para petani. Dalam meningkatkan pendapatan sesungguhnya para petani sangat dipengaruhi oleh sarana produksi yang digunakan oleh petani dalam kegiatan pertanian mereka.

Kredit dapat mempengaruhi output petani, pendapatan dan kesejahteraan para petani. Akses ke kredit pertanian merupakan faktor penting dalam memperluas pendapatan dan investasi. Petani yang memiliki akses kredit pertanian akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki akses untuk kredit pertanian (Amanullah *et al.*, 2019). Kelangkaan barang ekonomi pertanian dan akses yang tidak memadai kredit dapat mempengaruhi kesejahteraan petani, yang terdiri dari produksi pertanian, rezeki, dan ketahanan pangan (Asiedu *et al.*, 2013; Awotide *et al.*, 2015; Chaiya *et al.*, 2023). Menurut (Ciaian *et al.*, 2012) mengungkapkan bahwa bahwa, kredit tidak hanya mengurangi produksi pertanian tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.

Menurut dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan para petani dapat tercapai jika para petani memiliki ketentraman hidup yang berasal dari beberapa faktor. Salah satunya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti kebutuhan primer dan sekunder agar hidup para petani layak dan tercukupi baik secara materi ataupun batin.

### **Penerapan Kredit Pertanian di Indonesia**

Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, perubahan pola makan, pandemi global, dan konflik semuanya mengancam ketahanan pangan dan pertanian. Hal ini menimbulkan tekanan besar bagi para pembuat kebijakan untuk berfokus pada pembangunan sektor pertanian-pangan yang tangguh dan berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk mengatasi tantangan ini dan mengakhiri kelaparan, pemerintah perlu berinvestasi dan membantu petani memperoleh dana yang mereka butuhkan agar lebih tangguh dan berkelanjutan. Mesin pertanian dan penggunaan input yang bervariasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi para petani membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak petani yang menggunakan tabungan mereka atau harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena itu, kredit pertanian sangat penting untuk membiayai investasi yang diperlukan. Selain itu, kredit pertanian juga penting untuk modernisasi dan komersialisasi sektor pertanian dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tinjauan yang dilakukan oleh Nielson dan Tierney menunjukkan bahwa kredit pertanian memberikan kesempatan bagi petani untuk menggunakan inovasi yang efektif dan sumber daya yang lebih efisien guna meningkatkan ketahanan pangan (Chaiya *et al.*, 2023)

Menurut (Shuaibu & Nchake, 2021) dalam jurnalnya menunjukkan bahwa penjabatan kredit memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas pertanian dan keuntungan petani, terutama melalui investasi dalam input pertanian. Studi juga menunjukkan bahwa

pembangunan keuangan memberikan dampak positif pada pertanian, tetapi dampaknya diredam oleh kelemahan kelembagaan. Oleh karena itu, sistem kredit pertanian formal yang efisien dan kebijakan pembiayaan pertanian yang tepat perlu dikembangkan untuk membantu petani memperoleh akses ke teknologi modern dan meningkatkan produktivitas serta keuntungan mereka.

Tujuan dari bantuan kredit ini adalah untuk mendukung pelaksanaan program dengan dinamis sesuai dengan target, prosedur, dan rentang waktu serta pendekatan indikator tingkat keberhasilan program. Oleh karena itu, kredit pertanian merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk membahas kredit pertanian ini, perlu mencakup aspek dari segi kehidupan rakyat, kebiasaan bercocok tanam yang sangat terbatas, dan lain-lain (Ekawati, 2022). Dalam jurnal (Saleem & Jan, 2020) menjelaskan bahwa banyak negara maju telah mengakui manfaat menggunakan teknologi pertanian modern. Namun penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil pertanian telah meningkatkan kebutuhan pembiayaan petani.

Penerapan kredit pertanian di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program kredit yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Kredit diberikan untuk membantu masyarakat dalam bidang usaha dengan memberikan modal. Dana untuk kredit diperoleh dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan disimpan di bank, kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan melalui pemberian kredit, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR hanya tersedia dari bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Bukopin. KUR bertujuan untuk membantu perekonomian usaha rakyat kecil dengan memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikannya (Monulandi *et al.*, 2016)
2. Bank Indonesia menerapkan kebijakan likuiditas makroprudensial (macroprudential liquidity provision/MLP) yang memberikan fasilitas kredit jangka panjang bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan pedesaan. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keseluruhan sektor keuangan, dengan cara mengatasi risiko sistemik yang dapat terjadi akibat kegagalan lembaga atau pasar keuangan yang berdampak pada terjadinya krisis. Istilah ini menjadi populer setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan makroprudensial melalui beberapa instrumen seperti CAR (Capital Adequacy Ratio) dan GWM (Giro Wajib Minimum). CAR merupakan regulasi yang menetapkan persyaratan cadangan modal tambahan, yang berfungsi sebagai buffer ketika perekonomian mengalami fase ekspansi dan dapat digunakan ketika perekonomian mengalami fase kontraksi. Sedangkan GWM atau Reserve Requirement adalah persyaratan likuiditas bagi perbankan untuk menyimpan dananya dalam bentuk rupiah di Bank Sentral. Besarnya dana yang harus disetor ke Bank Indonesia tergantung pada persentase tertentu dari total DPK (Dana Pihak Ketiga) rupiah bank (Yoel, 2016)
3. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga pembiayaan khusus untuk sektor pertanian, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri, untuk memberikan kredit pertanian dengan persyaratan yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah.
4. Dalam rangka meningkatkan akses petani ke kredit pertanian, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program perluasan akses keuangan atau financial inclusion, termasuk pembentukan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Menurut (Mursid, 2018), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi. Sebagai baitul maal, BMT berperan dalam pengumpulan dana dan distribusi dana tersebut untuk kepentingan sosial. BMT

berperan sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan. Dalam hal ini, BMT merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan bisnis secara bersamaan.

5. Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif dan subsidi bagi petani yang mengajukan kredit pertanian, seperti pembebasan pajak dan bantuan pupuk serta bibit unggul. Menurut (Hutagaol & Hartoyo, 2013) Sejak awal tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian memulai sebuah program baru yang memberikan bantuan langsung kepada petani pangan melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. Untuk bantuan benih padi hibrida, petani akan menerima bantuan sebesar 15 kg benih, 250 kg NPK, 750 kg POC granul dan 5 liter POC cair per hektar. Sedangkan untuk bantuan benih padi non-hibrida, bantuan yang diberikan adalah 25 kg benih, 100 kg NPK, 300 kg POC butiran (granule), dan 2 liter POC cair per hektar. Peraturan Menteri Pertanian No. 30/Permentan/OT.140/6/2008 adalah lampiran yang mengatur mengenai program bantuan ini.

### **Pengaruh Kredit Pertanian Bagi Petani di Indonesia**

Sektor pertanian merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan produktivitas dan perkembangan pertanian diperlukan ketersediaan modal yang cukup baik dalam bentuk uang, tanah, pupuk, mesin, dan lain sebagainya. Kredit pertanian juga menjadi bantuan utama dari pihak luar atau lembaga keuangan dalam memperkuat modal yang dibutuhkan dalam bidang pertanian. Ada dua jenis modal yaitu modal pinjam (credit) dan modal pribadi (equity capital) (Lumbanraja, 2013).

Kredit pertanian merupakan bagian penting dari strategi pembangunan di sektor pertanian karena meningkatnya harga kebutuhan bercocok tanam seperti pupuk, pestisida, dan benih dengan varian unggul. Terdapat sumber kredit formal dan informal, di mana kredit formal dapat diperoleh dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, sedangkan kredit informal dapat diperoleh dari teman, kerabat, atau pedagang. Kredit pertanian terbagi menjadi kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang, dan keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas petani karena adanya input yang tepat waktu dan memadai (Ojiya, 2017). program kredit sangat berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama karena jumlah populasi yang terus bertambah. Program kredit juga dianggap sebagai pendorong pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam produksi pangan, yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena harga bahan pokok yang mahal (Ding & Kinnucan, 2013).

Kredit formal dan informal memiliki dampak yang berbeda pada pertanian dan petani. Kredit formal dapat membantu meningkatkan produktivitas dan memperluas bisnis, tetapi dapat sulit diakses oleh petani kecil atau yang kurang memiliki jaminan. Kredit informal dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak, tetapi suku bunga yang tinggi dapat memberatkan petani dan produsen pertanian. Oleh karena itu, petani dan produsen pertanian harus mempertimbangkan pilihan kredit dengan cermat dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka. Baik kredit formal maupun informal dapat memiliki pengaruh positif pada pertanian dan petani, tergantung pada bagaimana kredit tersebut diakses dan dikelola. Kredit formal dan informal dapat bekerja sama untuk memperkuat akses ke keuangan bagi petani dan produsen pertanian serta mempromosikan perkembangan pertanian yang berkelanjutan (Iski *et al.*, 2016).

Kredit pertanian jangka pendek memiliki beberapa pengaruh positif pada pertanian, di antaranya (Faiziah & Sofyan, 2014) yaitu meningkatkan produktivitas petani dengan menyediakan modal untuk membeli input pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen karena adanya akses ke teknologi pertanian yang lebih modern dan berkualitas. Memperkuat daya tahan pertanian dalam menghadapi risiko yang tidak terduga seperti bencana alam, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga pasar. Meningkatkan pendapatan petani karena hasil panen yang lebih baik dapat dijual dengan harga yang lebih baik di pasar. Mendorong pembangunan ekonomi lokal dengan memberikan modal kepada petani kecil dan menengah yang dapat meningkatkan daya beli mereka di pasar lokal.

Kredit pertanian jangka panjang juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada pertanian dan petani. Berikut adalah beberapa pengaruh kredit pertanian jangka panjang (Heri Susanto, Ramon Syahril, 2022) yaitu meningkatkan investasi dalam pertanian kredit pertanian, memperkuat keberlanjutan pertanian, meningkatkan kemampuan petani untuk bersaing, mengurangi risiko kredit pertanian jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kredit pertanian jangka panjang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani, penting untuk diingat bahwa kredit juga dapat memiliki risiko dan biaya yang harus diperhitungkan. Kreditur harus mempertimbangkan kemampuan keuangan petani dan memastikan bahwa mereka memiliki rencana pembayaran yang jelas dan terukur untuk membayar kembali kredit. Meskipun kredit pertanian jangka pendek dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi petani, penting untuk diingat bahwa kredit juga dapat memiliki risiko dan biaya yang harus diperhitungkan. Kreditur harus mempertimbangkan kemampuan keuangan petani dan memastikan bahwa mereka memiliki rencana pembayaran yang jelas dan terukur untuk membayar kembali kredit (Rosmiati, 2012).

Menurut (Adewale, A.T *et al.*, 2022) ada beberapa pengaruh pemerintahan dalam keberhasilan program kredit pertanian, diantaranya kebijakan pemerintah harus terfokus pada pengembalian modal petani seperti permaksimalan energi, pemerintah mendorong atau mempromosikan tabungan dan kredit bank agar dapat mengejar pembangunan disektor pertanian, adanya aturan yang tegas dalam pembebanaan antara suku bunga kredit dan suku bunga tabungan sehingga memotivasi petani untuk menabung dalam upaya menghasilkan dana pinjaman yang dibutuhkan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Kredit Pertanian Di Indonesia Dalam melakukan sebuah usaha tani petani memerlukan layanan keuangan yang dapat mendukung perkembangan pertanian. Hal ini menimbulkan tekanan besar bagi para pembuat kebijakan untuk berfokus pada pembangunan sektor pertanian-pangan yang tangguh dan berkelanjutan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kredit pertanian merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk membahas kredit pertanian ini, perlu mencakup aspek dari segi kehidupan rakyat, kebiasaan bercocok tanam yang sangat terbatas, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan meningkatnya harga kebutuhan bercocok tanam seperti naiknya harga pupuk, pestisida, benih dengan varientas unggul dan lain sebagainya. Kredit pertanian jangka pendek dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada pertanian, terutama pada petani kecil dan menengah yang membutuhkan akses ke modal untuk mempertahankan produksi mereka dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Perlunya konsep pembangunan yang lebih terintegrasi sehingga memiliki peluang untuk meraih keberhasilan dalam pembangunan pertanian. Selain itu pemerintah melakukan pendekatan terhadap petani mengenai permasalahan yang di alami maupun dibutuhkan. Untuk memastikan jaminan maupun keamanan, disarankan para petani-petani di suatu

daerah membentuk koperasi sehingga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan sumber daya atau Bentuk kelompok untuk mengumpulkan kredit atau kredit dari bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian*, 6(2), 117–138. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>
- Adewale, A.T, Lawal O.A, Aberu, F, & Toriola A.K. (2022). Effect of Credit to Farmers and Agricultural Productivity in Nigeria. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(3), 377–388. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i3.99>
- Ali, E., Ege, N., Awade, E., & Ali, E. (2019). Credit constraints and soybean farmers' welfare in subsistence agriculture in Togo. *Heliyon*, 5, 1550. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019>
- Amanullah, Jing, W., Khan, I., Channa, S. A., & Magsi, H. (2019). Farm level impacts of credit constraints on agricultural investment and income. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, 56(2), 511–521. <https://doi.org/10.21162/PAKJAS/19.7872>
- Ashari. (2019). OPTIMALISASI KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA Policy Optimization of Credit Program for Agricultural Sector in Indonesia Pengalaman krisis moneter pada tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa sektor pertanian memiliki peran st. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7, 21–42.
- Asiedu, E., Kalonda-Kanyama, I., Ndikumana, L., & Nti-Addae, A. (2013). Access to credit by firms in sub-Saharan Africa: How relevant is gender? *American Economic Review*, 103(3), 293–297. <https://doi.org/10.1257/aer.103.3.293>
- Awotide, B. A., Abdoulaye, T., Alene, A., & Manyong, V. M. (2015). *Give to AgEcon Search Impact of Access to Credit on Agricultural Productivity: Evidence from Smallholder Cassava Farmers in Nigeria*. <http://ageconsearch.umn.edu>
- Chaiya, C., Sikandar, S., Pinthong, P., Saqib, S. E., & Ali, N. (2023). The Impact of Formal Agricultural Credit on Farm Productivity and Its Utilization in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Sustainability (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15021217>
- Ciaian, P., Fałkowski, J., & Kancs, d'Artis. (2012). Access to credit, factor allocation and farm productivity: Evidence from the CEE transition economies. *Agricultural Finance Review*, 72(1), 22–47. <https://doi.org/10.1108/00021461211222114>
- Ding, L., & Kinnucan, H. W. (2013). This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search . Help ensure our sustainability . *Journal of Gender, Agriculture and Food Security*, 1(3), 1–22.
- Ekawati, Y. A. (2022). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Hospitality*, 11(1), 589–595.
- Faiziah, A., & Sofyan. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Ekspor, Investasi Dan Kredit Perbankan Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisep*, 15(2), 36–44.

- Heri Susanto , Ramon Syahril, A. B. (2022). Jurnal Ekonomi. *JURNAL EKONOMIKA45 Vol 9 No. 2 (Juni 2022) – E-ISSN:2798-575X ; P-ISSN:2354-6581, 9(2)*.
- Hutagaol, M. P., & Hartoyo, S. (2013). Ekonomi Pangan: Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk Untuk Usahatani Pangan. *Pangan, 22(1)*, 11–20.
- Iski, N., Kusnadi, N., & Harianto, H. (2016). Pengaruh Kredit Terhadap Pendapatan Petani Kopi Arabika Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis, 13(2)*, 132–144. <https://doi.org/10.17358/jma.13.2.132>
- Saleem, M. A., & Jan, F. A. (2020). The Impact of Agricultural Credit on Agricultural Productivity in Dera Ismail Khan (District) Khyber Pakhtonkhawa Pakistan. *European Journal of Business and Management. www.iiste.org*
- Lampah, L. R., Porajouw, O., & Kapantow, G. H. M. (2017). Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Sawah dan Petani Jagung di Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat, 13(3A)*, 397–406.
- Lumbanraja, M. (2013). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1(10)*, 14760.
- Monulandi, M. M., Dumais, J. N. K., & Pangemanan, L. R. J. (2016). *Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara (Vol. 12, Issue 2)*.
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia. *Nurani, 18(2)*, 9–30. [http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/Koperasi\\_Desember\\_2015.pdf](http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/Koperasi_Desember_2015.pdf)
- Musshoff, O., Weber, R., & Danne, M. (2023). *Farmers' preference for digital credit: Does the delivery channel matter? March, 1–24*. <https://doi.org/10.1093/qopen/qoad007>
- Ojiya, E. (2017). An Empirical Analysis of the effect of Agricultural Input on Agricultural Productivity in Nigeria. *International Journal of Agricultural Science and Food Technology, 3(4)*, 077–085. <https://doi.org/10.17352/2455-815x.000026>
- Ololade, R. A., & Olagunju, F. I. (2018). *Determinants of Access to Credit among Rural Farmers in Oyo Determinants of Access to Credit among Rural Farmers in Oyo State, Nigeria. 13(August)*, 17–22.
- Prayitno, H., & Sapuguh, I. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Menggunakan Logika Fuzzy MCDM. *Jurnal Ilmiah Scroll, 73–83*.
- Rosmiati, M. (2012). Pengaruh Kredit terhadap Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Padi Sawah: Aplikasi Model Ekonomi Rumah Tangga Usaha Tani. *Jurnal Manajemen Teknologi, 11(2)*, 208–224.
- Rasoki, T., & Sudhiebo, I. (2019). Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Perkebunan Rakyat untuk Pembiayaan Peremajaan Sawit Rakyat di Indonesia. *Seminar Nasional Ke-IV Fakultas Pertanian Universitas Samudra, 48–60*.
- Safitri, L. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Mengakses Kredit Bagi Petani. *The World of Business Administration Journal, 1(2)*, 125–142. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.750>

- Shuaibu, M., & Nchake, M. (2021). Impact of credit market conditions on agriculture productivity in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Finance Review*, 81(4), 520–534. <https://doi.org/10.1108/AFR-05-2020-0063>
- Sossou, C. H., Noma, F., & Yabi, J. A. (2014). *Rural Credit and Farms Efficiency: Modelling Farmers Credit Allocation Decisions, Evidences from Benin. 2014.*
- Yoel, E. M. T. (2016). Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM Perbankan Indonesia. *Bina Ekonomi*, 20(1), 77–96.